

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aritonang, Rasamala, et.all, 2019, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Bakri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal, Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media dan P3IH UMJ, Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Formil dan Materil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Bandung
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hartaningsih, Maria, 2011, *Korupsi Yang Memiskinkan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Girsang, Juniver, 2012, *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta
- Gottschalk, Petter, 2018, *Fraud Examiners in Proovate Investigations of White-Collar Crime*, dalam buku *Fraud and Corruption*, Springer International Publishing AG, Cham Switzerland



- Hadjon, Philipus M., 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Jurdi, Fajlurrahman, 2017, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta
- Kerlinger, Fred, 1996, *Asas-asas Penelitian Behavioral, diterjemahkan Landung R. Simatupang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta
- _____, 2015, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi, 2002. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta
- Nuraeny, Henny 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Priyatno, Dwidja 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korupsi di Indonesia*, Utomo, Bandung
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sakidjo, Aruan dkk, 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sema, Mansyur 2008, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik)*, Yayasan Indonesia Obor, Jakarta



- Soekanto, Soerjono 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1986, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita, Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung
- Sumardjono, Maria SW., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- _____, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Surbakti, Nartangsa 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syamsyudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tuanakotta, Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- _____, 2018 *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)



- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400)

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010)

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1888)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

D. Makalah/Jurnal/Tulisan Hukum/Laporan

Adonara, Firman Floranta, 2015, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, Mahkamah Konstitusi



Arief, Barda Nawawi, 2013, “Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal MMH*, Jilid 42, No 1. Januari 2013. FH Universitas Diponegoro.

Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019

_____, *SEMA No.4/2016, Kebijakan MA Soal Kerugian Negara*, Majalah Warta BPK, Edisi 01 – Vol.VII Janurari 2017

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Laporan Kinerja BPKP Tahun 2015

_____, Laporan Kinerja BPKP Tahun 2016

_____, Laporan Kinerja BPKP Tahun 2017

_____, Laporan Kinerja BPKP Tahun 2018

_____, Laporan Kinerja BPKP Tahun 2019

Fatkurohman dan Nalom Kurniawan, 2017, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1, Maret 2017, Mahkamah Konstitusi

Indonesia Corruption Watch, 2020, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta



- Kumalaningdyah, Nur, 2019, "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 Issue 3, September 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Lavenia, Nike Beauty, 2017, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-PUU/XIV/2016 Tentang Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lukman, Marcus, 1996, "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional", *Disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung
- Marzuki, Laica, 1996, "Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan", Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang
- Newman, Nicholas, 2012, "Indonesia: Telling Lies", *World Policy Journal*, Vol. 28, No. 4 (Winter 2011 / 2012), Duke University Press
- Noor, Hendry Julian, 2018, "Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi". *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pelizzo, Riccardo dan Bernice Ang, 2008, "A Code of Conduct for Indonesia: Problems and Perspectives", *Jurnal Parliamentary Affairs* Vol. 61 No. 2, 2008, Oxford University Press
- Rukmi, Dewi Sekar, 2016, "Implikasi Perbedaan Penghitungan Nilai Kerugian Negara Dalam Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kerugian Negara", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Salmi, Akhilar, 2009, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini dan Masa Datang", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Soepardi, Eddy Mulyadi, 2009, "Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi", disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009



- Sumeleh, Elisa J.B., 2017, “Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 9, November 2017
- Wara, I Nyoman, 2017, “Metode dan Teknik Penghitungan Kerugian Negara”, disampaikan pada *Knowledge Transter Forum* pada Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Ambon, 13 Februari 2017
- Widiandaru, Tunggoro, 2014, “Analisis Hukum Kewenangan Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 64/PDT.G/2009/PN.YK)”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yuntho, Emerson, *et.all*, 2014, “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi:”, Indonesia Corruption Watch, Jakarta

E. Internet

- Antaraneews.com, “Terkena OTT Pungli, Dua PNS Bantul Dipecat”, <https://jogja.antaraneews.com/berita/360613/terkena-ott-pungli-dua-pns-bantul-dipecat> , diakses pada 29 Maret 2020 pukul 16.04 WIB
- BBC Indonesia, “KPK Sebut Tak Ada Pidana di Kasus Ahok – RS Sumber Waras”,https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160614_indonesia_bpk_dpr_sumberwaras , diakses pada 17 Februari 2020
- BeritaSatu.com, “Saksi Ahli: Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi Bisa Dihitung Oleh KPK”, <https://www.beritasatu.com/hukum/343407-saksi-ahli-kerugian-negara-dalam-perkara-korupsi-bisa-dihitung-oleh-kpk.html> , diakses pada 5 Maret 2020
- Bizlawnews.com, “Siapa yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi?”, <http://www.bizlawnews.id/2017/02/siapa-yang-berwenang-menghitung.html> , diakses pada 6 Maret 2020
- BPKP Kalimantan Timur, “Peranan Inspektorat Dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli”, <http://www.bpkp.go.id/kaltim/berita/read/22025/0/Peranan-Inspektorat-Dalam-Audit-Penghitungan-Kerugian-Kuangan-Negara-dan-Pemberian-Keterangan-Ahli> . , diakses pada 16 Maret 2020
- Budhiman, Ilham, “Kasus R.J. Lino : BPKP Tunggu KPK Serahkan Data Untuk Hitung Kerugian Negara”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191202/16/1176640/kasus-r.j.-lino>



bpk-tunggu-kpk-serahkan-data-untuk-hitung-kerugian-negara- diakses pada 30 Maret 2020

Daud, Ameidyo, 2017, “Beda Kerugian Negara E-KTP, Ketua BPK Tak Persoalkan Versi BPKP”, <https://katadata.co.id/berita/2017/03/13/kerugian-negara-e-ktp-versi-bpkp-ketua-bpk-itu-terserah-pengadilan> , diakses pada 19 Oktober 2019

Fitra, Safrezi, “Lima Instruksi Jokowi Terkait Larangan Kriminalisasi Pejabat”, <https://katadata.co.id/berita/2016/07/19/lima-instruksi-jokowi-terkait-larangan-kriminalisasi>, diakses pada 12 Maret 2020

Harianjogja.com, “Pungli Bantul: Kasus Pungli Pariwisata Disarankan Dihentikan”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/03/15/511/801716/pungli-bantul-biaya-tinggi-dianggap-tak-sebanding-kerugian> , diakses pada 29 Maret 2020 pukul 16.19 WIB

Hiariej, Eddy O.S., 2018, “Memahami Konsep RUU Hukum Pidana”, http://koran-sindo.com/page/news/2018-07-17/1/0/Memahami_Konsep_RUU_Hukum_Pidana , diakses pada 12 Mei 2020

Hidayat, Anwar, 2017, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling”, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses pada 14 Oktober 2019.

HukumOnline.com, “Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya/>, diakses pada 3 April 2020

HukumOnline.com, “Sanksi Administratif jadi Alternatif Atas Kerugian Negara”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a8c5f5467f0/sanksi-administratif-jadi-alternatif-atas-kerugian-negara/> , diakses pada 5 Maret 2020

Hukumonline.com, “Suhadibroto: Sulit Menggugat Koruptor Secara Perdata”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12178/suhadibroto-sulit-menggugat-koruptor-secaraperdata/>, diakses pada 17 Maret 2020

Ilyas, Wirawan B., “Penilaian Hukum Terhadap Penghitung Kerugian Negara”, <https://investor.id/opinion/penilaian-hukum-terhadap-penghitung-kerugian-negara> , diakses pada 5 Maret 2020

Madril, Oce, 2016, “Ke(tidak)sepakatan KPK-BPK”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/52242-ke-tidak-sepakatan-kpk-bpk>, diakses pada 28 Oktober 2019



- Maharani, Tsarina, “RKUHP dan RUU PAS Dibahas, DPR Klaim Hanya Bongkar Pasal Kontroversial”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/15395101/rkuhp-dan-ruu-pas-dibahas-dpr-klaim-hanya-bongkar-pasal-kontroversial?page=1> , diakses pada 5 Mei 2020
- Mashabi, Sania, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 Naik Jadi 40”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40?page=all> diakses pada 2 Februari 2020, pukul 12.37 WIB
- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, 2016, “Jaksa Hitung Kerugian Negara, Tersangka Protes”, <http://kejati-kaltim.go.id/berita/jaksa-hitung-kerugian-negara-tersangka-protas>, diakses pada 28 Oktober 2019
- Kristiono, Nefan, “Empat Tahun Kasus Korupsi RJ Lino Tak Kunjung Selesai, KPK Salahkan BPKP dan BPK”, <https://www.minews.id/news/empat-tahun-kasus-korupsi-rj-lino-gak-kunjung-selesai-kpk-salahkan-bpkp-dan-bpk> , diakses pada 30 Maret 2020
- Pratama, Fajar, “Tentang Perbedaan BPK dan KPK Soal Unsur Melawan Hukum di Kasus Sumber Waras”, <https://news.detik.com/berita/3237665/tentang-perbedaan-bpk-dan-kpk-soal-unsur-melawan-hukum-di-kasus-sumber-waras> , diakses pada 17 Februari 2020
- Rachman, Dylan Aprialdo, “Kabareskrim: Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi lebih besar daripada Kerugian Negara”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/15355151/kabareskrim-anggaran-penyidikan-kasus-korupsi-lebih-besar-daripada-kerugian> , diakses pada 3 Maret 2020
- Rahmi, Novrieza, “Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Negara? SEMA pun Tak Mengikat”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat> diakses pada 21 Oktober 2019
- Ramadan, Ardito, “KPK Rilis Kajian dan Draf Revisi UU Tipikor, Cantumkan Korupsi Sektor Swasta hingga Perdagangan Pengaruh”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/19/13445201/kpk-rilis-kajian-dan-draf-revisi-uu-tipikor-cantumkan-korupsi-sektor-swasta?page=2>, diakses pada 1 Juni 2020
- Republika, “KPK Terima hasil Audit BPK Terkait Kasus RJ Lino”, <https://republika.co.id/berita/q4kw2o428/kpk-terima-hasil-audit-bpk-terkait-kasus-rj-lino> , diakses pada pada 30 Maret 2020
- Tribunnews.com, “Ada Kerugian Negara di Kasus Pungli TPR Parangtritis”, <https://jogja.tribunnews.com/2017/03/13/ada-kerugian-negara-di-kasus-pungli-tpr-parangtritis> , diakses pada 29 Maret 2020